

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) DI SMP NEGERI 2 SEMARANG**

Oleh:

Ines Delaney Natasha, Aufarul Marom, Dewi Rostyaningsih

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Education is a major factor for a nation in order to carry out the construction. Seeing the importance of education for a nation, takes the role of government to meet the needs of the community. One of the efforts made by the government through the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia is a program of the School Operational Assistance or BOS. BOS Program is a program that supports the 9-year compulsory education program, in which each learner exempt from all operational costs of education.

The research was conducted in SMP Negeri 2 Semarang and was based on the fact that in its implementation, still there are problems such as limited use of the funds for the school, as the executor. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the School Operational Assistance (BOS) in SMP 2 Semarang and describe the driving factors and obstacles in the implementation of the Program School Operational Assistance (BOS) in SMP 2 Semarang.

Based on research, the implementation of the School Operational Assistance (BOS) in SMP 2 Semarang is still not optimal. Therefore, the recommendations can be given is to not restrict the use of funds for each school, differences in the percentage of acceptance of funds received by schools based on the needs of each school, and the preparation of JUKNIS BOS not too stiff to use BOS funds can be more optimally.

Keywords: Education, Implementation, School Operational Assistance Program

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah faktor utama bagi sebuah bangsa dalam rangka melaksanakan pembangunan. Setiap negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa membedakan status, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 pada (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Namun kualitas pendidikan di Indonesia masih dikatakan sangat rendah. Dari data Pusat Data dan Informasi Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003, tercatat bahwa anak putus sekolah yang berusia 7-15 tahun berjumlah sekitar 693.700 orang atau sekitar 1,7% dari total penduduk berusia 7-15 tahun. Sedangkan angka putus sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat menengah berjumlah 2,7 juta orang atau sebesar 6,7% dari total penduduk berusia 7 hingga 15 tahun. Jumlah angka putus sekolah tersebut kemungkinan besar akan terus meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari data Komnas Perlindungan Anak bahwa pada tahun 2006 tercatat jumlah anak putus sekolah berjumlah 9,7 juta anak yang kemudian pada tahun 2007 jumlah tersebut bertambah sebesar 20% atau menjadi 11,7 juta jiwa.

Melihat permasalahan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan guna meningkatkan angka partisipasi masyarakat terhadap

pendidikan, yaitu melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan BOS juga merupakan upaya dalam hal menyukseskan kebijakan pembangunan pendidikan yang memprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Diknas) 9 tahun.

Program di bidang pendidikan ini mendapat alokasi anggaran dana cukup besar dari pemerintah. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana ke sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Program ini mulai dilaksanakan pertama kali pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran 2005/2006.

Kota Semarang sendiri sudah mulai melaksanakan program BOS sejak tahun 2006 yang diterima untuk satu semester yaitu bulan Juli-Desember sedangkan untuk tahun 2007 memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 28.457.976.000,00. Dana BOS diterima langsung oleh masing-masing lembaga pendidikan, Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama baik melalui nomor rekening Kepala Sekolah. Sampai dengan tahun 2013 ini, tercatat ada 171 SMP, baik negeri maupun swasta, yang menerima BOS di Kota Semarang dengan alokasi dana sebesar Rp. 662.278.770.000,00.

Sayang, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan di berbagai sisi, misalnya, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat dalam

memperoleh layanan pendidikan, namun dalam prakteknya pelaksanaan program BOS masih jauh dari apa yang kita harapkan. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat masih dibebani dengan adanya biaya pendaftaran siswa baru di tingkat SMP, selain itu ada pula biaya untuk sumbangan uang gedung sekolah yang dibebankan kepada siswa.

Hal ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan pelaksanaan program BOS yang seyogyanya benar-benar membebaskan masyarakat dari penarikan biaya sepeser pun dari pihak sekolah. Seiring dengan hal tersebut maka pertanyaan yang diajukan adalah “bagaimana implementasi program BOS di SMP Negeri 2 Semarang serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya?”

B. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semarang.
2. Mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semarang.

C. Teori

1. Kebijakan Publik

Thomas R Dye, 1981 (dalam Budi Winarno, 2012: 20) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembuat keputusan yang kemudian dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Kebijakan publik meliputi seluruh proses dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2008: 139) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul apabila kebijakan tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

3. Program Bantuan Operasional Sekolah

Implementasi BOS merupakan suatu program dinamis, di mana pelaksanaan program harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Tahapan pelaksanaan harus dilakukan oleh orang yang profesional di bidangnya agar tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan bersama serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan dari dijalankannya program ini. Untuk melihat bagaimana implementasi program BOS di SMP N 2 Semarang maka peneliti akan melihat pada berbagai kriteria, yaitu:

1. Pelaksanaan program BOS di SMP Negeri 2 Semarang untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Juknis

BOS yaitu untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

2. Penggunaan dana BOS. Dalam Juknis BOS tertulis bahwa dana BOS harus dimanfaatkan untuk seluruh kegiatan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

4. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dalam perkembangan implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Oleh karena program BOS menggunakan pendekatan Top Down, maka peneliti memilih menggunakan model implementasi oleh George Edwards III yang melibatkan empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala SMP Negeri 2 Semarang dan Staff Bagian Monitoring dan Pengembangan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data yang

berbentuk tulisan dan data berbentuk kata-kata. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara terhadap informan dan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen, buku, data statistik, laporan, dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kualitas data dilakukan dengan uji kredibilitas, *ransferability* dan reabilitas. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasi melalui reduksi data yang diperoleh, kemudian data dipilah, dan disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 2 Semarang

1.1 Penggunaan Dana BOS

Dalam pelaksanaannya, alur pencairan dana BOS di SMP Negeri 2 Semarang adalah melalui Dinas Pendidikan Kota Semarang yang kemudian ditransfer ke rekening khusus BOS SMP Negeri 2 Semarang. Dana BOS dikeluarkan selama empat kali dalam setahun, yaitu diberikan pada tiap triwulan.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil

kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan.

Penggunaan dana BOS seluruhnya telah diatur di dalam JUKNIS BOS yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan setiap tahun. Sepanjang tahun 2014, SMP Negeri 2 Semarang total memperoleh dana BOS sebanyak Rp. 504.810.000,00. Namun dalam hal penggunaan dana BOS, masih terdapat kendala yaitu terkait dengan pembatasan penggunaan dana BOS yang diatur melalui JUKNIS BOS.

1.2 Pengalokasian Dana BOS

Pengelolaan dana BOS berkaitan erat dengan transparansi serta laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Tiap sekolah penerima dana BOS diwajibkan untuk membentuk Tim Manajemen BOS tingkat sekolah sebagai pihak-pihak yang diberikan mandat serta tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola dana yang diberikan untuk akhirnya dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tim Manajemen BOS Tingkat

Sekolah sendiri terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara serta perwakilan orang tua murid selain Komite Sekolah.

Pihak SMP Negeri 2 Semarang dinilai telah transparan mengenai penerimaan serta penggunaan dana BOS. Hal ini dapat dilihat dari adanya papan pengumuman yang berisi penerimaan dana BOS pada tiap triwulan selama satu tahun, serta pengeluaran dana BOS pada tiap triwulan selama satu tahun. Papan pengumuman tersebut dipasang di bagian depan sekolah. Berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban, SMP Negeri 2 Semarang telah melaksanakan sesuai dengan aturan, yaitu menyerahkan laporan pengelolaan dana pada tiap akhir triwulan dalam satu tahun.

2. Pencapaian Tujuan Program BOS

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga memiliki tiga tujuan khusus yang ingin dicapai, yaitu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, serta membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Dalam pelaksanaannya, SMP Negeri 2 Semarang dinilai telah mampu melaksanakan program

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari bahwa SMP Negeri 2 Semarang sudah tidak lagi mengadakan penarikan iuran atau pungutan untuk biaya operasional sekolah dalam bentuk apapun.

Walaupun demikian, SMP Negeri 2 Semarang masih menerima sumbangan secara sukarela dari orang tua murid. Sumbangan tersebut masih diperbolehkan dengan syarat bersifat tidak mengikat, tidak ditentukan besarnya, serta tidak ada tenggat waktu dalam pemberiannya. Sumbangan secara sukarela ini biasanya diberikan oleh orang tua pada tiap tahun ajaran baru, yang diserahkan langsung kepada pegawai Tata Usaha SMP Negeri 2 Semarang.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program BOS di SMP 2 Semarang

3.1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Dalam hal implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Semarang, komunikasi yang dilakukan adalah antara pihak Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah kepada orang tua atau wali murid SMP Negeri 2 Semarang. Komunikasi tersebut dapat bersifat sosialisai, yang isinya adalah membahas apa itu Program BOS, besaran dana yang diberikan, serta

penggunaan dana yang diterima oleh pihak sekolah.

Berkaitan dengan sosialisasi yang diadakan oleh pihak sekolah SMP Negeri 2 Semarang, diketahui bahwa SMP Negeri 2 Semarang secara rutin mengadakan sosialisasi pada orang tua atau wali murid pada tiap tahun ajaran baru. Kegiatan sosialisasi tersebut membahas besaran dana yang diperoleh sekolah pada tahun ajaran tersebut serta rencana pengalokasian dana yang telah diterima. Orang tua atau wali murid siswa baru juga diberikan penjelasan mengenai apa itu Program BOS agar orang tua dapat memahami dengan betul apa tujuan serta manfaat dari adanya Program BOS.

Selain komunikasi, faktor pendorong lain dalam implementasi program BOS di SMP Negeri 2 Semarang adalah sumber daya manusia. Berkaitan dengan Program BOS di tingkat sekolah, sumber daya manusia yang bertindak sebagai implementor adalah Tim Manajemen BOS di tingkat sekolah, yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara serta perwakilan orang tua selain komite. Agar Tim Manajemen BOS memiliki pengetahuan serta keterampilan yang baik, maka dibutuhkan arahan dari pihak Dinas Pendidikan Kota yang dilakukan melalui sosialisasi. Dinas Pendidikan Kota Semarang sendiri diketahui sudah melaksanakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah

penerima Dana BOS di Kota Semarang.

Arahan dan sosialisasi telah rutin dilakukan dua kali pada tiap tahunnya. Arahan dan sosialisasi tersebut pada dasarnya dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program BOS pada tahun sebelumnya serta membahas mengenai JUKNIS BOS untuk tahun selanjutnya untuk kemudian dipelajari oleh Tim Manajemen BOS pada tingkat sekolah. Dengan adanya arahan tersebut maka Tim Manajemen BOS dapat mengetahui bagaimana cara melaksanakan Program BOS sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih baik lagi.

3.2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi program BOS di SMP Negeri 2 Semarang adalah sumber daya finansial. Yaitu berkaitan dengan besaran dana yang diterima oleh pihak SMP Negeri 2 Semarang dirasa tidak bisa disama ratakan dengan besaran dana yang diterima oleh sekolah lain dengan kualitas pendidikan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh tiap sekolah mempunyai kebutuhan dan kondisi yang berbeda dengan sekolah lain. Selain itu juga pemanfaatan dana yang diterima oleh pihak sekolah tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena adanya JUKNIS BOS yang memuat aturan mengenai komponen pembiayaan penggunaan dana BOS.

Faktor penghambat yang kedua adalah karakteristik kebijakan itu sendiri, yaitu dengan adanya Petunjuk Teknis BOS atau JUKNIS BOS, yang sebenarnya merupakan pedoman bagi pelaksana dalam melaksanakan program BOS. Namun dengan adanya JUKNIS BOS, juga dirasa menghalangi pihak sekolah dalam hal memanfaatkan dana BOS yang tersedia. Tim Manajemen BOS sekolah merasa bahwa ada banyak komponen yang seharusnya bisa dibiayai dengan dana BOS, namun karena tidak tercantum dalam JUKNIS BOS mengakibatkan sekolah tidak dapat mengalokasikan dananya untuk menutupi biaya-biaya yang dibutuhkan tersebut. Pembatasan-pembatasan ini sangat terkait dengan indikator penggunaan dana.

Contoh nyata yang terjadi di SMP Negeri 2 Semarang adalah pihak sekolah tidak bisa melakukan pengadaan untuk sarana dan prasarana karena komponen pembiayaan tersebut tidak tercantum dalam JUKNIS BOS. Jadi ketika ada fasilitas sekolah yang rusak, sekolah hanya bisa melakukan perbaikan saja tetapi tidak bisa mengganti dengan yang baru.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program BOS di SMP Negeri 2 Semarang

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa

implementasi program BOS di SMP Negeri 2 Semarang sudah cukup baik, walaupun masih ada kendala dalam implementasinya. Hal tersebut dapat dilihat dari:

- a. Penggunaan dana BOS belum bisa dilakukan secara maksimal seperti ada beberapa komponen pembiayaan yang seharusnya bisa ditutupi dengan dana BOS namun tidak bisa dilakukan karena adanya batasan penggunaan dana.
- b. Pengelolaan dana BOS sudah cukup baik dilihat dari laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang yang sudah dilakukan secara berkala dan rutin setiap triwulan serta transparansi penggunaan dana BOS sudah dilakukan dengan memasang papan pengumuman di area sekolah.
- c. Pencapaian tujuan BOS di SMP Negeri 2 Semarang juga sudah bisa dikatakan tercapai dengan melihat kondisi bahwa sekolah sudah tidak lagi melakukan pungutan atau iuran dalam bentuk apapun kepada siswa sehingga seluruh biaya operasional sekolah sudah tidak lagi membebankan siswa terutama siswa miskin.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program BOS

Faktor yang mempengaruhi implementasi program BOS di SMP Negeri 2 Semarang dapat

dilihat dari faktor pendorong serta faktor penghambat, yaitu:

- a. Faktor pendorong dalam implementasi Program BOS di SMP Negeri 2 Semarang dapat disimpulkan yaitu adanya komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua atau wali murid terkait dengan sosialisasi pengelolaan dana BOS oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 2 Semarang. selain itu faktor lain yang mendukung implementasi pendukung implementasi Program BOS di SMP Negeri 2 Semarang adalah faktor sumber daya manusia yaitu Tim Manajemen BOS SMP Negeri 2 Semarang yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara serta perwakilan orang tua murid. Tim Manajemen BOS SMP Negeri 2 Semarang secara rutin mengikuti arahan serta sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang terkait program BOS tiap tahunnya sehingga dapat memaksimalkan kinerja mereka dalam implementasi Program BOS di SMP Negeri 2 Semarang.
- b. Faktor penghambat dalam implementasi Program BOS di SMP Negeri 2 Semarang dapat disimpulkan yaitu terkait dengan sumber daya finansial yaitu adanya hambatan pihak sekolah dalam menggunakan dana BOS karena adanya aturan-aturan dalam hal penggunaan

dana BOS. Selain itu, pihak SMP Negeri 2 Semarang juga merasa besaran dana yang diterima tidak bisa disamaratakan dengan sekolah lain dengan tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Faktor lain yang menghambat adalah karakteristik kebijakan yang dilihat dari JUKNIS BOS yang dirasa masih terlalu kaku dalam hal pemanfaatan dana BOS pada tiap-tiap sekolah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka beberapa saran yang bisa penulis berikan yaitu terkait hambatan dengan adanya JUKNIS BOS adalah sebaiknya dalam hal komponen pembiayaan yang diperbolehkan menggunakan dana BOS disusun dengan lebih fleksibel yaitu dengan melihat bahwa setiap sekolah mempunyai kebutuhan dan dengan kondisi yang berbeda-beda, sehingga dalam pembatasan penggunaan dana tidak bisa disamaratakan dengan sekolah lain. Tiap sekolah seharusnya diberikan kebebasan, selama dana yang digunakan adalah untuk kegiatan belajar mengajar dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Kadir Karding. (2008). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri*

di Kota Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro.

Agustino, Leo.(2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Kusumanegara, Solahudin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani.(2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Satya Adhi H. (2011). *Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Singaribun, Masri. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Siswoyo, Dwi. (2008). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Subarsono, AG.(2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*.Yogyakarta: CAPS.

Internet

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia. Diakses pada tanggal 05 Juni 2014 pukul 19.00 WIB

Portal BOS Online Kota Semarang. Dalam<http://disdik.semarangkota.go.id/bosonline/>. Diakses pada tanggal 21Oktober 2013 pukul 19.00 WIB

Tentang BOS: Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012. Dalam <http://bos.kemdikbud.go.id/home/abou>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2013 pukul 20.00 WIB

Dokumen

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013